Pelanggaran Etika Bisnis dalam Kegiatan Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis terhadap Dampak Sosial dan Lingkungan

Firman Sah*[1], Hendy Satria[2]
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE Pembangunan Tanjungpinang, Kepulauan Riau[1,2]
*[1]e-mail: fsah06856@gmail.com
[2]e-mail: hendysatria@stie-pembangunan.ac.id

ABSTRAK
Penambangan nikel di wilayah Raja Ampat telah memicu berbagai kontroversi yang berkaitan dengan pelanggaran etika bisnis, terutama menyangkut dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam praktik penambangan nikel di daerah tersebut, serta mengevaluasi konsekuensi sosial dan ekologis terhadap masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mencakup studi literatur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat sering kali mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis, seperti transparansi, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dampak yang ditimbulkan mencakup kerusakan pada ekosistem laut dan darat, hilangnya sumber pendapatan bagi masyarakat setempat, serta munculnya konflik sosial. Temuan ini menekankan pentingnya penegakan regulasi yang ketat, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam kegiatan industri ekstraktif, terutama di daerah yang memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi seperti Raja Ampat.

Kata kunci : Dampak Sosial; Nilai Ekologis; Penambangan Nikel; Raja Ampat.

ABSTRACT
Nickel mining in the Raja Ampat region has triggered various controversies related to business ethics violations, particularly concerning the resulting social and environmental impacts. This study aims to analyze the forms of business ethics violations occurring in nickel mining practices in the region, as well as to evaluate the social and ecological consequences for local communities and environmental sustainability. The research employed a qualitative approach, including literature review and document analysis. The findings indicate that nickel mining activities in Raja Ampat often neglect key principles of business ethics, such as transparency, social responsibility, and respect for the rights of indigenous communities. The impacts include damage to marine and terrestrial ecosystems, loss of income sources for local residents, and the emergence of social conflicts. These findings highlight the importance of strict regulatory enforcement, public participation in decision-making, and the application of sustainability principles in extractive industries—especially in areas with high ecological and cultural value, such as Raja Ampat.

Keywords **:** *Social Impact; Ecological Value; Nickel Mining; Raja Ampat*

PENDAHULUAN
Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi, tetapi juga merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk kandungan mineral seperti nikel. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan global yang meningkat terhadap nikel, seiring dengan kemajuan industri kendaraan listrik dan teknologi baterai, telah mendorong ekspansi aktivitas pertambangan di wilayah ini (Amnesty International Indonesia, 2023). Sayangnya, di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, muncul berbagai persoalan serius terkait pelanggaran etika bisnis yang berdampak langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat lokal (Sulistyowati, 2018; Suwandi, 2017).

Di tengah narasi besar pemerintah mengenai transisi energi dan investasi ramah lingkungan, terdapat ironi yang pahit: Raja Ampat—salah satu daerah dengan kekayaan biodiversitas laut terbesar di dunia—sedang berada di ambang kehancuran ekologis (Hidayat, 2025). Rencana eksploitasi tambang nikel di Pulau

Kawe, yang merupakan wilayah konservasi dalam kawasan Raja Ampat, menunjukkan bahwa kondisi alam Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan lebih dari itu, tengah diperjualbelikan dengan harga murah oleh negara itu sendiri (Raden & Maria, 2025).

Isu penambangan nikel di Raja Ampat telah menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk lembaga lingkungan, akademisi, hingga masyarakat lokal yang merasa bahwa hak-hak mereka terabaikan (Detikcom, 2025; Rhamadanty, 2025). Pelanggaran etika yang dimaksud tidak hanya mencakup ketidakpatuhan terhadap prosedur permohonan izin dan partisipasi masyarakat lokal, tetapi juga mencakup manipulasi informasi, ketidaktransparanan dalam proses konsultasi publik, serta pengabaian terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Dampak dari situasi ini terlihat jelas, mulai dari kerusakan ekosistem hutan dan perairan, penurunan kualitas hidup masyarakat, hingga potensi konflik sosial akibat perebutan ruang hidup dan sumber daya.

Dalam dunia etika bisnis, setiap perusahaan memiliki kewajiban moral dan sosial kepada para pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal dan ekosistem tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai pelanggaran etika bisnis yang terjadi dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat serta menilai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan analisis kritis, studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan yang lebih adil, serta memperkuat posisi masyarakat lokal dalam memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan yang bersih.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis kualitatif untuk menganalisis secara mendalam bentuk-bentuk pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat serta mengevaluasi dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan sekitar. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen hukum, laporan perusahaan tambang, kajian akademis, serta artikel-artikel yang membahas aktivitas pertambangan dan isu etika bisnis di wilayah tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang melibatkan proses identifikasi tema-tema utama seperti bentuk pelanggaran etika, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Selain itu, dilakukan interpretasi tematik yang mengaitkan data empiris dengan kerangka teoritis mengenai etika bisnis dan keberlanjutan lingkungan.

Populasi dalam penelitian ini mencakup kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh aktivitas penambangan, yaitu masyarakat lokal, pekerja di perusahaan pertambangan, pihak berwenang, serta organisasi non-pemerintah (LSM). Sampel ditentukan secara purposif berdasarkan informasi yang dianggap relevan dalam berbagai artikel dan dokumen yang membahas isu terkait. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa penyusunan laporan didasarkan pada data yang objektif dan bertanggung jawab. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu-isu strategis yang muncul dari kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat, khususnya dalam kaitannya dengan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu situasi yang sedang dihadapi Raja Ampat saat ini adalah tantangan berat terkait aktivitas pertambangan. Wilayah ini tengah mengalami isu pertambangan nikel, khususnya di Pulau Lawe, yang merupakan bagian dari kawasan konservasi di Raja Ampat. Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan bahwa terdapat empat perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan saat ini menjadi objek pengawasan kementerian. Keempat perusahaan tersebut adalah PT Gag Nikel (PT GN), PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM), PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP).

PT Gag Nikel melakukan kegiatan penambangan di Pulau Gag dengan luas area sekitar 6.030,53 hektare. Sementara itu, PT Anugerah Surya Pratama memiliki bukaan tambang seluas kurang lebih 109 hektare di Pulau Manuran yang memiliki total luas 743 hektare. PT Kawei Sejahtera Mining diketahui telah membuka lahan seluas 89,29 hektare di Pulau Kawe yang memiliki luas keseluruhan 4.561 hektare dan termasuk dalam kawasan hutan.

Adapun PT Mulia Raymond Perkasa telah mengembangkan dua lokasi tambang, yakni di Pulau Manyaifun seluas 21 hektare dan di Pulau Batang Pele seluas 2.000 hektare. Namun demikian, PT MRP diketahui tidak memiliki dokumen lingkungan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Akibatnya, seluruh kegiatan eksplorasi di lokasi tersebut dihentikan. Sementara itu, PT KSM terbukti membuka area tambang di luar izin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas lima hektare di Pulau Kawe.

PT Anugerah Surya Pratama (ASP), yang merupakan perusahaan penanaman modal asing asal Tiongkok, diketahui melakukan kegiatan penambangan di Pulau Manuran seluas sekitar 746 hektare tanpa adanya sistem pengelolaan lingkungan dan tanpa pengolahan limbah cair. Sebagai respon, KLH/BPLH telah memasang papan tanda peringatan di lokasi sebagai upaya penghentian aktivitas tambang tersebut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Sasmita Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya telah memantau aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 26 hingga 31 Mei 2025.

Dampak sosial dari pelanggaran ini sangat terlihat nyata. Aktivitas penambangan telah mengganggu tatanan sosial masyarakat adat yang selama ini hidup selaras dengan alam dan menggantungkan kehidupan pada sumber daya pesisir serta hutan (Irawan, 2020; Purba, 2021). Ketika wilayah tangkapan ikan atau hutan adat dirusak akibat eksplorasi dan eksploitasi tambang, masyarakat tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tetapi juga mengalami keterasingan dari budaya dan identitas mereka sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial, bahkan konflik, baik secara horizontal antarwarga maupun secara vertikal dengan pihak otoritas, yang dapat menciptakan ketidakstabilan di daerah yang seharusnya dijaga sebagai kawasan konservasi (Yuniati, 2025).

Dari perspektif lingkungan, dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat sangat memprihatinkan. Kerusakan hutan tropis, pencemaran perairan laut, serta terganggunya keseimbangan ekosistem menjadi isu utama (Asnawi & Salman, 2025; Tempo, 2024). Padahal, wilayah ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia (Raden & Maria, 2025). Penambangan yang tidak terkontrol secara baik dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang yang sulit dipulihkan (Hidayat, 2025). Dalam kerangka etika lingkungan, tindakan ini mencerminkan bentuk ketidakadilan ekologis, karena mengorbankan lingkungan hidup demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Terakhir, tampak bahwa kontribusi pemerintah dalam memantau dan menegakkan peraturan masih belum optimal. Ketidaktegasan dalam mengambil tindakan terhadap pelanggaran, minimnya transparansi dalam proses perizinan, serta kurangnya partisipasi masyarakat menunjukkan adanya kelemahan serius dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah ini. Apabila situasi ini terus dibiarkan, bukan hanya lingkungan dan masyarakat Raja Ampat yang akan merasakan dampaknya, tetapi juga reputasi negara dalam mengelola kawasan konservasi kelas dunia yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional dan aset masa depan.

SIMPULAN

Penambangan nikel di Raja Ampat mengungkap berbagai bentuk pelanggaran serius terhadap etika bisnis yang berdampak luas terhadap masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap prosedur perizinan, pengabaian partisipasi masyarakat adat, manipulasi informasi publik, serta lemahnya komitmen terhadap prinsip keberlanjutan mencerminkan praktik bisnis yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab.

Secara sosial, aktivitas pertambangan telah mengganggu kehidupan masyarakat adat, memicu konflik internal, serta menyebabkan marginalisasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang telah lama dijaga. Sementara itu, dari sisi lingkungan, dampak yang ditimbulkan mencakup deforestasi, sedimentasi laut, pencemaran air, dan kerusakan kawasan konservasi yang mengancam ekosistem unik dan rentan di Raja Ampat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis secara tegas dalam industri ekstraktif, khususnya di wilayah yang memiliki nilai ekologis dan kultural tinggi. Tanpa perubahan signifikan dalam aspek regulasi, transparansi, dan pelibatan aktif masyarakat,

keberlanjutan sosial dan lingkungan di Raja Ampat akan terus berada dalam ancaman serius (Amnesty International Indonesia, 2023; Sulistyowati, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International Indonesia. (2023). *Eksploitasi Tambang di Indonesia dan Pelanggaran HAM: Studi Kasus Papua dan Maluku*.

Asnawi, A., & Salman, R. (2025). *Tambang Nikel Raja Ampat, Kerusakan Tak Bakal Pulih*. Mongabay.co.id. https://mongabay.co.id/2025/06/08/tambang-nikel-raja-ampat-kerusakan-tak-bakal-pulih/amp/

Detikcom. (2025). *Ramai-ramai Bersuara Soroti Aktivitas Tambang di Raja Ampat*. Detiknews. https://news.detik.com/berita/d-7952842/ramai-ramai-bersuara-soroti-aktivitas-tambang-di-raja-ampat/amp

Hidayat, W. (2025). *Raja Ampat, Tambang Nikel, dan Krisis Etika Lingkungan: Ketika Negara Gagal Menjadi Penjaga Alam*. Literasi Hukum Indonesia. https://literasihukum.com/raja-ampat-tambang-nikel-dan-krisis-etika-lingkungan-ketika-negara-gagal-menjadi-penjaga-alam/

Irawan, H. (2020). Dampak Sosial Pertambangan Terhadap Komunitas Lokal di Kawasan Konservasi. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan Daerah*, *6*(1), 45–60.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Pedoman Evaluasi Dampak Lingkungan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara*. KLHK.

Purba, T. A. (2021). Penambangan dan Dampaknya terhadap Kearifan Lokal di Papua Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *10*(2), 155–170.

Raden, & Maria, C. (2025). *Dampak Tambang Nikel di Raja Ampat versi Greenpeace*. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/dampak-tambang-nikel-di-raja-ampat-versi-greenpeace-1654703

Rhamadanty, S. (2025). *4 Tambang Nikel di Raja Ampat yang Lakukan Pelanggaran Lingkungan Serius Versi KLH*. Kontan. https://amp.kontan.co.id/news/4-tambang-nikel-di-raja-ampat-yang-lakukan-pelanggaran-lingkungan-serius-versi-klh

Sulistyowati, R. (2018). Etika Lingkungan dan Eksploitasi Sumber Daya Alam dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Etika Sosial*, *4*(2), 133–145.

Suwandi, S. (2017). *Etika Bisnis: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan*. Salemba Empat.

Tempo. (2024). *Jejak Tambang di Surga Laut Raja Ampat*.

Yuniati, I. (2025). *Kerusakan Ekologis di Raja Ampat, Ancaman pada Lingkungan hingga Kesehatan*. Espos Indonesia. https://eco.espos.id/kerusakan-ekologis-di-raja-ampat-ancaman-pada-lingkungan-hingga-kesehatan-2105799/amp